



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karuniaNya maka Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat tersusun.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bandung tahun 2018 – 2023. Sebagai sebuah dokumen perencanaan disusun dari hasil pengumpulan dan komplikasi data serta masukan dari para pejabat dan seluruh staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperoleh kesepakatan dan dukungan dari instansi terkait, eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sosial guna terwujudnya sinkronisasi.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, masukan dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan ke depan.

Kepada semua pihak yang terlibat dan membantu penyusunan Perubahan Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 7 Desember 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG**

H. TATANG MUHTAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19680602 198903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.....	12
2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.....	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.....	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih.....	32
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	40
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	42

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	49
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	55
BAB VII	KENERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	79
BAB VIII	PENUTUP.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala-kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

UU No.25/2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana Pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang Perencanaan jangka panjang (25 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun), berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi, misi dan program yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD. RPJPD Kota Bandung tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung, merupakan dokumen induk perencanaan daerah yang memuat visi,

misi dan arah kebijakan dan pendekatan pembangunan yang diarahkan kepada kondisi, potensi, permasalahan kebutuhan nyata daerah dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah. RPJMD ini dijabarkan dalam Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung tahun 2019-2023. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Perubahan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Perubahan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Perubahan Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Perubahan Renstra serta pengumpulan data dan informasi;

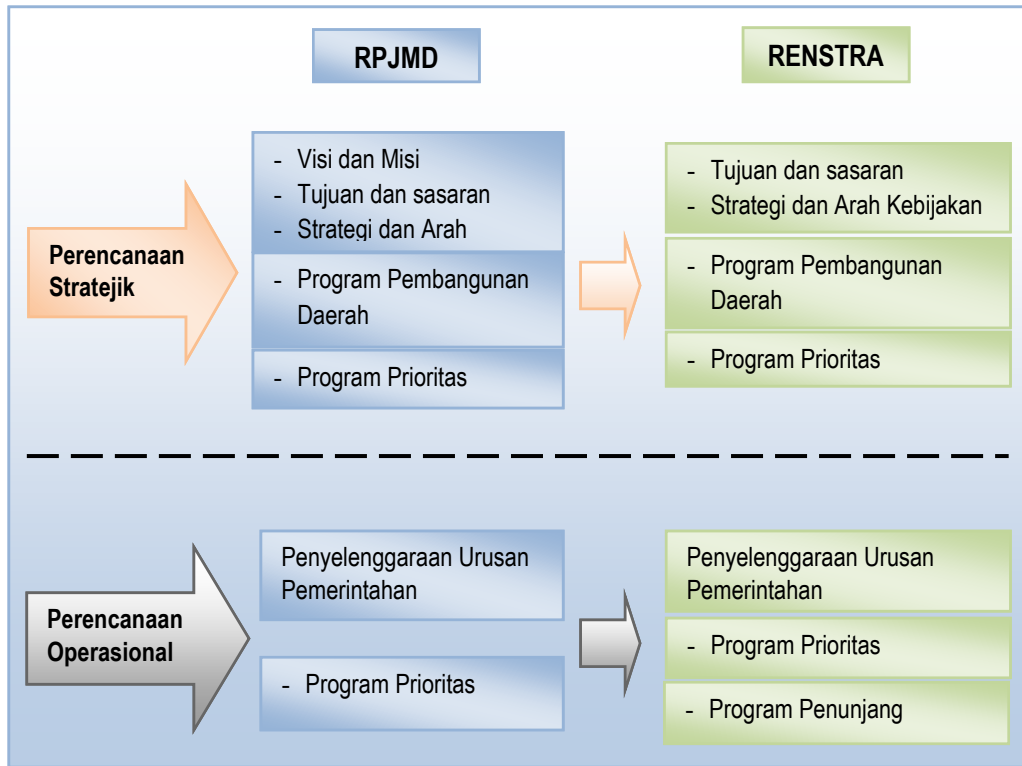
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Perubahan Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan Perubahan Renstra SKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Perubahan Renstra oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Perubahan Renstra oleh Bappelitbang Kota Bandung.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan Perubahan RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Hubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Mengingat peran dan fungsi Renstra sangat penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat, maka penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan secara transparan dan partisipatif. Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018-2023 berisi arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum, keuangan/anggaran dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pedoman yang bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005- 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023
18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1391 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga akan

- bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
 4. Memudahkan seluruh jajaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1391 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2.1.2. Fungsi

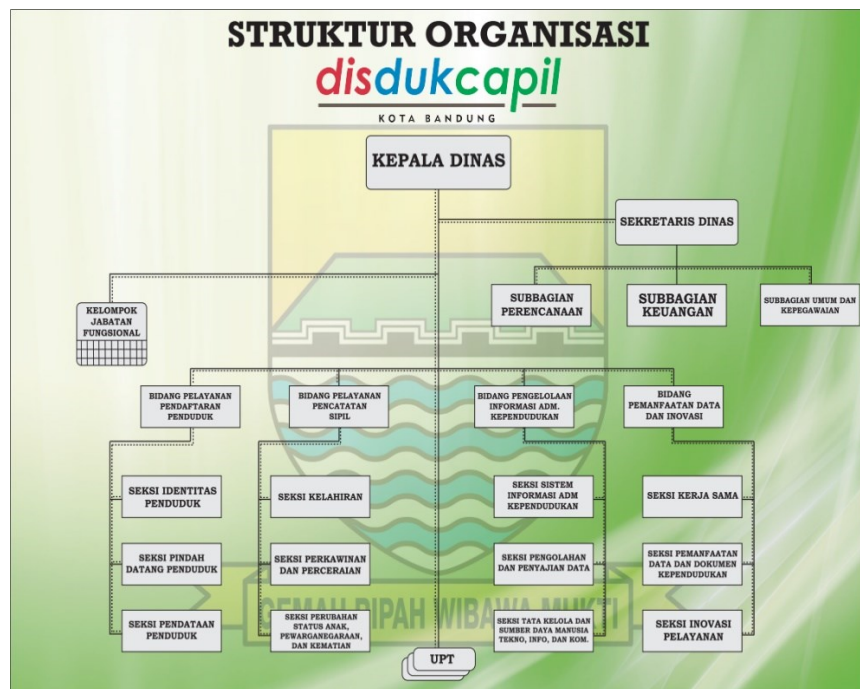
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan lingkup Kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. pelaksanaan kebijakan lingkup Kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Gambar 2.1
**Struktur Organisasi
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kota Bandung**



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Bandung, maka Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari
 - 1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - 3) Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari
 - 1) Seksi Kelahiran;
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari
 - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
 - 3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari
 - 1) Seksi Kerjasama;

- 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - 3) Seksi Inovasi Pelayanan.
- g. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung didukung sumber daya sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun 2018 berjumlah 175 orang yang terdiri dari 89 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 67 orang Non Aparatur Sipil Negara. Jumlah ASN sebanyak 89 orang dapat dikualifikasikan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan dan eselon dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	12 Orang
2.	Sarjana	43 Orang
3.	Diploma III	2 Orang

4.	Diploma II	1 Orang
5.	SMA	26 Orang
6.	SMP	3 Orang
7.	Sekolah Dasar	2 Orang
	Jumlah	89 Orang

Sumber data : sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

Tabel 2.2
**Data Kualifikasi Pangkat/Golongan Pegawai
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kota Bandung**

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1 Orang
2.	Golongan IV/b	1 Orang
3.	Golongan IV/a	6 Orang
4.	Golongan III/d	12 Orang
5.	Golongan III/c	4 Orang
6.	Golongan III/b	24 Orang
7.	Golongan III/a	13 Orang
8.	Golongan II/d	16 Orang
9.	Golongan II/c	5 Orang
10.	Golongan II/b	2 Orang
11.	Golongan II/a	4 Orang
12.	Golongan I/d	1 Orang
13.	Golongan I/c	- Orang
14.	Golongan I/b	- Orang

15.	Golongan I/a	- Orang
	Jumlah	89 Orang

Sumber data : sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

Tabel 2.3

**Data Formasi Eselonering Pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandung**

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Eselon II.b	1 Orang
2.	Eselon III.a	1 Orang
3.	Eselon III.b	4 Orang
4.	Eselon IV.a	14 Orang
5.	Fungsional Umum	68 Orang
	Jumlah	89 Orang

Sumber data : sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

2.2.2. Prasarana, Sarana, Peralatan dan Perlengkapan Kerja (Inventaris)

Prasarana, Sarana, Peralatan dan Perlengkapan Kerja (Inventaris) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Data Inventaris
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandung

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1	unit	1000 m ² (3 lantai)
2.	Kendaraan Roda Empat	15	unit	6 unit operasional struktural, 10 unit mobil pelayanan keliling
3.	Kendaraan Roda Dua	75	unit	
4.	Server Unit	2	Unit	
5.	PC Unit	246	Unit	
6.	Laptop	39	Unit	
7.	Printer	283	Unit	

Sumber data : sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diantaranya melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, mengelola database, pemanfaatan data kependudukan dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam bentuk dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, serta surat keterangan kependudukan lainnya.

Meningkat semakin bertambahnya penduduk Kota Bandung,

kebijakan Wali Kota untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta melanjutkan pelayanan yang telah dilaksanakan selama ini oleh pihak kecamatan, maka khususnya pelayanan dokumen kependudukan KK dan KTP tetap dilaksanakan di Kantor Kecamatan, adapun pelayanan yang lainnya tetap dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Dengan adanya program pemberlakuan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tahun 2012, maka seluruh KK dan KTP yang telah diterbitkan harus dilakukan penggantian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya menegaskan tentang KTP elektronik yang disebut sebagai KTP-el sebagai nomenklatur dan berlaku seumur hidup dan pengurusannya menjadi tanggungjawab sepenuhnya pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nomor Induk Kependudukan menjadi identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik dan pengurusan serta penerbitan dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung melaksanakan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Sasaran/ target meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Indikator yang telah ditetapkan di Perubahan RPJMD Kota Kota Bandung 2013–2018 yaitu :
 - Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan.
3. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung terdapat 24 jenis layanan atau *output* pelayanan adminduk, yaitu :
 1. Kartu Keluarga
 2. Kartu Tanda Penduduk el (KTP-el)
 3. Kartu Identitas Anak (KIA)
 4. Surat Keterangan Pindah
 5. Surat Keterangan Pindah Datang
 6. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri
 7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
 8. Surat Keterangan Tempat Tinggal
 9. Surat Keterangan Kelahiran
 10. Surat Keterangan Lahir Mati
 11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawainan
 12. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
 13. Surat Keterangan Kematian
 14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
 15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
 16. Surat Keterangan Pengganti Identitas
 17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
 18. Akta Kelahiran

19. Akta Kematian
20. Akta Perkawinan
21. Akta Perceraian
22. Akta Pengakuan Anak
23. Akta Pengesahan Anak
24. Data Kependudukan

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	(20)	(21)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	82,90	83	85	85,50	86	82,92	89,80	-	-	-	1,01	1,10	-	-	-
2.	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	-	95	85,25	95,50	96,25	96,50	95,48	97,08	-	-	-	1,01	1,02	-	-	-
	• Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
	• Cakupan penerbitan KTP elektronik	-	97	97	98,50	98,75	99,00	97,14	99,63	-	-	-	1,00	1,03	-	-	-
	• Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	-	92	92,5	94,50	94,75	95	92,37	97,02	-	-	-	1,00	1,05	-	-	-
	• Cakupan penerbitan Akta Kematian	-	91	91,5	93,50	93,75	94	91,21	91,69	-	-	-	1,00	1,01	-	-	-
3.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	-	50	60	65	80	100	60	60	-	-	-	1,20	1,20	-	-	-

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
Tahun 2018 - 2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	20.506.394.672	18.700.804.188	-	-	-	18.999.338.835	15.542.640.563	-	-	-	92,65%	83,11%	-	-	-	23,30%	24,47%

2.4 Tantangan dan Peluang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bandung. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Hal ini berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung agar terdapat sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Analisis terhadap permasalahan tersebut, dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan *logic model*. Adapun peluang dan tantangan dapat diuraikan sebagai berikut:

Peluang (O) :

- a. Kota Bandung adalah merupakan salah satu Kota dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia;
- b. Apresiasi dan harapan yang tinggi dari pimpinan daerah, DPRD, dan masyarakat serta dari stakeholder lainnya di Kota Bandung

terhadap keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk terbangunnya suatu sistem data kependudukan yang baik;

- c. Kebutuhan akan tersedianya database kependudukan yang akurat, dan ketersediaan data tersebut sangat dibutuhkan oleh institusi atau lembaga lain; dan Kebutuhan masyarakat untuk memiliki dokumen administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tinggi.

Tantangan (T) :

- a. Wilayah Kota Bandung yang luas, dengan heterogenitas penduduk yang tinggi;
- b. Tingginya tingkat migrasi penduduk;
- c. Masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak begitu penting, sehingga kesadaran untuk mengurus dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja ditandai dengan nilai AKIP Tahun 2018 sebesar 74,13;

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diidentifikasi permasalahan, sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan,
2. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan dan legalitas pencatatan sipil.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dibidang administrasi kependudukan yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Wali kota terdiri dari faktor internal dan eksternal, masalah internal yang mempengaruhi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja sudah tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien namun belum optimal.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah:

1. Adanya multi interpretasi terhadap kewenangan Disdukcapil yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Belum optimalnya sinergitas pemanfaatan data dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam kurun waktu 2018-2023, yaitu :

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik Prima)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*Excellent Service*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan

pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Disdukcapil, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance*. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1)

Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan *SDM* Kota Bandung yang *berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung* pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,
- Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu,

keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam

pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih dan Melayani

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal

4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta

Berdasarkan telaahan visi, misi walikota terpilih diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kontribusi untuk mengawal keberhasilan Misi-2 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih dan Melayani.**

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berada dibawah binaan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung terakomodir pada tujuan ke -5 dari Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, diuraikan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi	Meningkatnya kualitas database kependudukan	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan

kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya	nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat
		Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Mengawal Misi ke-5 RPJMD Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

<p>Misi ke-5</p> <p>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>			
<p>Tujuan 5.1</p> <p>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>			
<p>Sasaran 5.1.1</p> <p>Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i>, bersih dan akuntabel</p>			
<p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL JAWA BARAT</p>	<p>Tujuan</p> <p>Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan</p>	<p>Sasaran</p> <p>Meningkatnya fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p>Indikator Sasaran</p> <p>Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat</p>
		<p>Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran</p>	<p>Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran</p>

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat , sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, memiliki kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) yaitu Inti Pusat Kota yang berada di Alun-alun untuk wilayah Bandung Barat dan Gedebage untuk wilayah Bandung Timur.
- b. Membagi Wilayah kota menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), masing masing dilayani oleh satu pusat sekunder, terdiri dari pusat sekunder Setrasari, melayani WP Bojonegara; pusat sekunder Sadangserang, melayani WP Cibeunying; Pusat Sekunder Kopo Kencana, melayani WP Tegalega; Pusat Sekunder Turangga, melayani WP Karees; Pusat Sekunder Arcamanik, melayani WP Ujungberung; dan Pusat Sekunder Margasari melayani WP Gedebage.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, tidak ditemukan rekomendasi yang mengarah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka pada dokumen Renstra ini tidak dilakukan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu –isu Strategis

Dari telaahan diatas terdapat tiga isu utama yang harus diantisipasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu :

1. Reformasi Birokrasi (Pelayanan Publik), untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan memerlukan strategi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung baik dari sisi sarana prasarana maupun *performance* pelayanan.
2. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berkewajiban untuk memberikan identitas kepada seluruh warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kota Bandung.
3. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Pendayagunaan *database* kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional sebagai isu utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Tujuan

Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Indikator Tujuan

Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan.

Tabel 4.1

SASARAN

Tujuan	Sasaran
Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/ instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaannya sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah sebanyak 3 (tiga) indikator. Indikator untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

**Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung**

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	2. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan
	3. Cakupan Pemanfaatan Data

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Sekretariat Daerah Kota Bandung sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada periode Tahun 2018-2023, secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
Tahun 2018-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019 (Realisasi)	2020 (Realisasi)	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tertib Administrasi Kependudukan		Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	95,48	97,08	95,50	96	96,5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,92	89,80	85	85,5	86
		Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	95,48	97,08	95,50	96	96,5
			Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	60	60	65	70	75

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta formulasi pengukuran sebagai berikut:

$$Q1 = \left(\frac{\Sigma \text{KK yg terbit sampai thn X}}{\Sigma \text{Kepala Keluarga}} \times 100\% \right)$$

$$Q2 = \left(\frac{\Sigma \text{Perekaman KTPEL}}{\Sigma \text{penduduk wajib KTPEL}} \times 100\% \right)$$

$$Q3 = \left(\frac{\Sigma \text{akta lahir 0-18thn}}{\Sigma \text{jumlah pnndk.0-18thn}} \times 100\% \right)$$

$$Q4 = \left(\frac{\Sigma \text{akta kematian yg terbit di thn X}}{\Sigma \text{kematian di thn X}} \times 100\% \right)$$

* masing-masing diberi bobot 25%

$$N = Q1 + Q2 + Q3 + Q4$$

Tujuan tersebut memiliki sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengukuran IKM ini dilakukan melalui hasil survey 9 (Sembilan) kriteria SKM baik dilakukan oleh pihak internal maupun oleh lembaga lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
2. Cakupan layanan administrasi kependudukan dengan formulisasi pengukuran sebagai berikut :

$$Q1 = \left(\frac{\Sigma \text{KK yg terbit sampai thn X}}{\Sigma \text{Kepala Keluarga}} \times 100\% \right)$$

$$Q2 = \left(\frac{\Sigma \text{Perekaman KTPEL}}{\Sigma \text{penduduk wajib KTPEL}} \times 100\% \right)$$

$$Q3 = \left(\frac{\Sigma \text{akta lahir 0-18thn}}{\Sigma \text{jumlah pnndk.0-18thn}} \times 100\% \right)$$

$$Q4 = \left(\frac{\Sigma \text{akta kematian yg terbit di thn X}}{\Sigma \text{kematian di thn X}} \times 100\% \right)$$

* masing-masing diberi bobot 25%

$$N = Q1 + Q2 + Q3 + Q4$$

3. Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\left(\frac{\Sigma \text{PKS Aktif}}{\Sigma \text{PKS}} \times 100\% \right)$$

Keterangan:

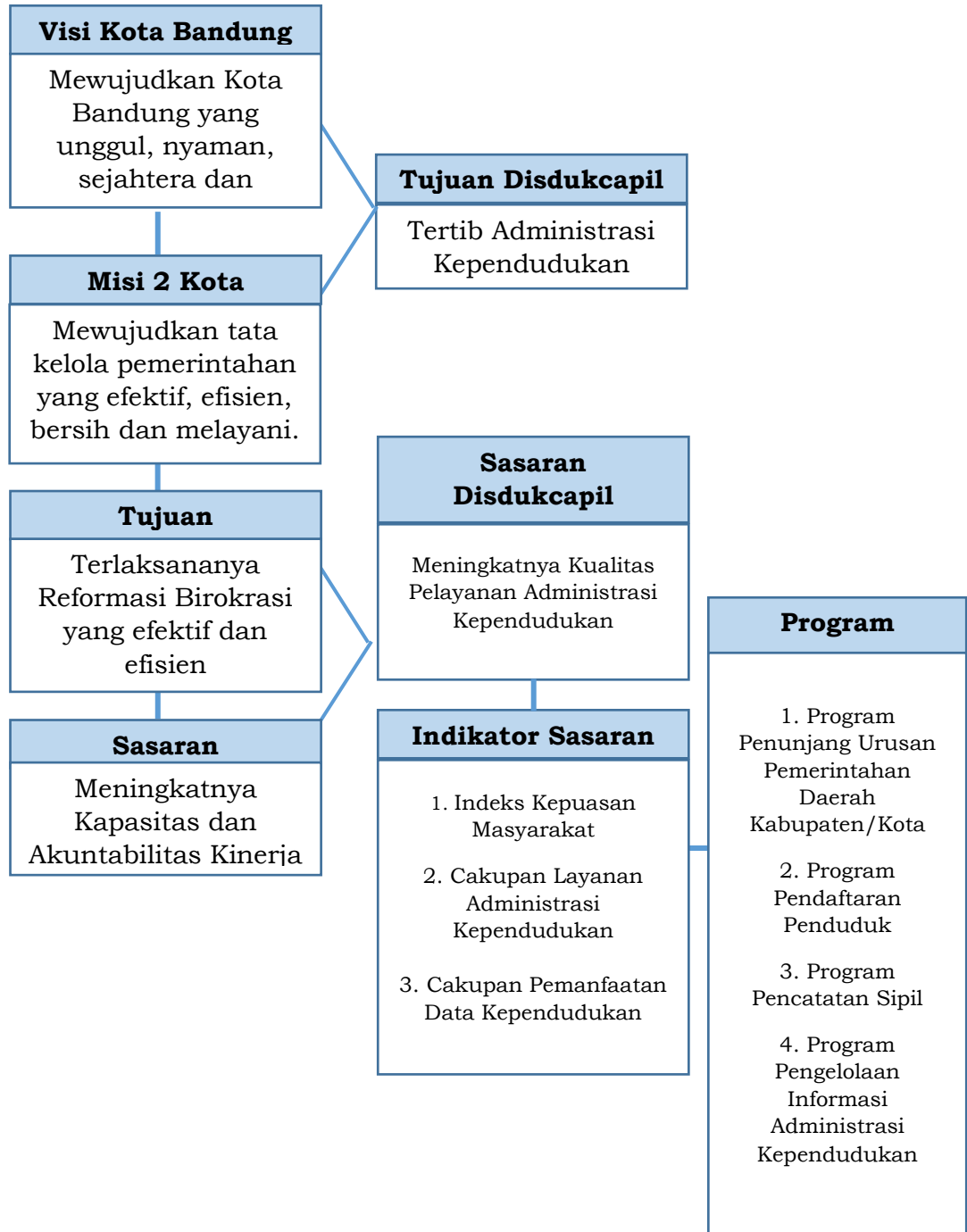
Σ PKS Aktif adalah Jumlah Lembaga Pengguna yang melakukan kerjasama di Kota Bandung yang aktif memanfaatkan data kependudukan

Σ PKS adalah jumlah Lembaga Pengguna di Kota Bandung yang melakukan perjanjian kerjasama

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung merupakan implementasi dari pernyataan Misi ke-2 RPJMD Kota Bandung, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

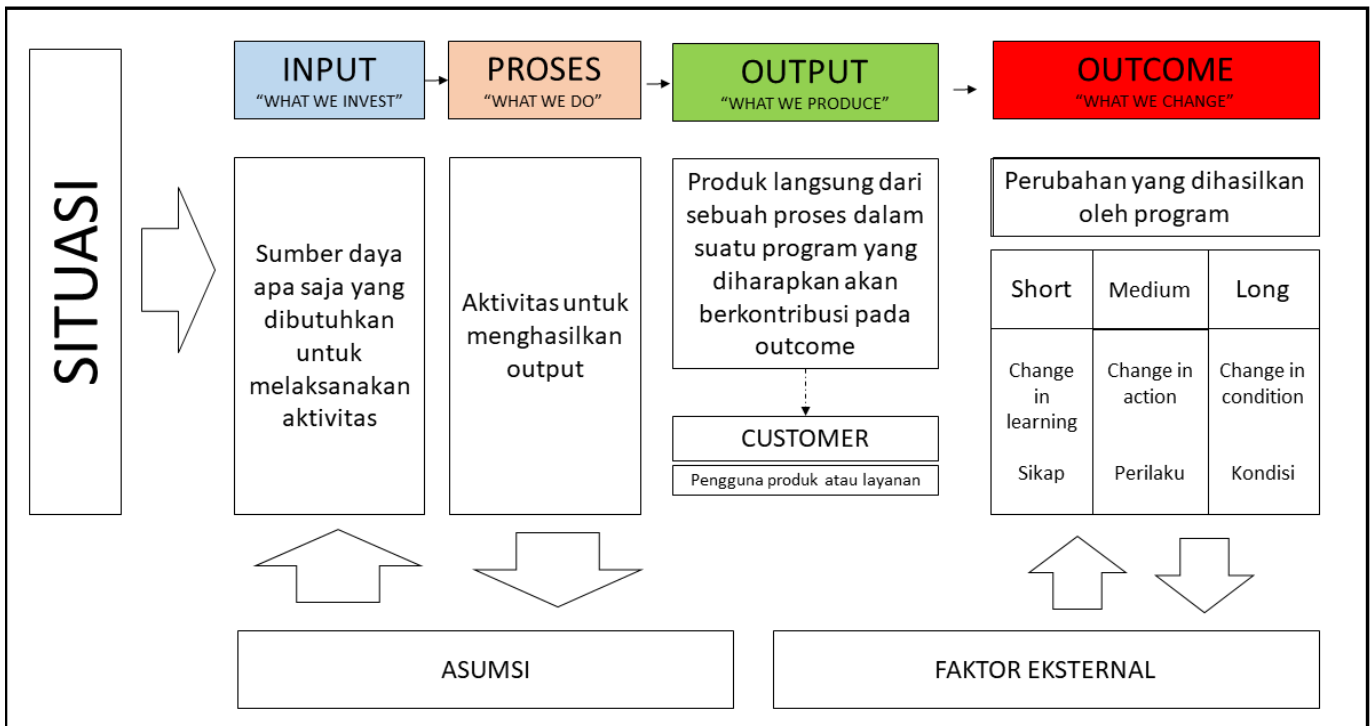
Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika. *Logic model* adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang

direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Perangkat Daerah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada Perangkat Daerah. Visualisasi *logic model* dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.1



Dari gambar diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. **Situasi** merupakan keadaan yang kompleks dari lingkungan, sosiopolitik dan ekonomi. Situasi dapat berupa suatu masalah atau isu yang dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan model logika. Pertanyaan yang dapat dikemukakan untuk memahami situasi antara lain: apa masalahnya? Apa penyebabnya? Pada siapa masalah tersebut terjadi? Apa yang kita ketahui terkait masalah tersebut? Adakah hasil riset dan pengalaman masa lalu yang dimiliki? Pelajaran apa yang dapat dipetik darinya? Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan landasan untuk menyusun model logika.
2. Setelah situasi dan masalah dianalisis, perlu ditentukan situasi mana yang mendapat perhatian intensif. Dengan kata lain, dalam

pengembangan model logika diperlukan prioritas dari situasi yang kompleks. Faktor dalam menentukan prioritas antara lain visi dan misi, nilai-nilai, sumber daya, data historis dan keahlian dan pengalaman.

3. **Outcome** merupakan perubahan atas suatu kondisi, perilaku, sikap, pengetahuan dan keterampilan sasaran program yang mengindikasikan kemajuan atau justru kemunduran terhadap tujuan dari program. Outcome berdimensi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Outcome jangka pendek menunjukkan hasil perubahan pembelajaran (*learning*) dan dapat dicapai dalam waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Outcome jangka menengah menunjukkan hasil perubahan tindakan (*action*) dan dapat dicapai dalam waktu 4 sampai dengan 6 tahun. Outcome jangka panjang menunjukkan hasil perubahan kondisi dari suatu organisasi, partisipan atau sistem secara umum.
4. **Output** merupakan produk langsung dari sebuah kegiatan dalam suatu program yang diharapkan akan berkontribusi pada outcome. Kriteria yang harus dimiliki output antara lain: output dikonsumsi oleh pihak eksternal bukan internal, memiliki cakupan yang lebih sempit daripada outcome, dan volume output akan mempengaruhi outcome secara langsung. Partisipan atau sasaran dari output merupakan pengguna dari produk atau layanan yang dihasilkan dari suatu program. Partisipan tersebut merupakan target program yang didesain akan dicapai.

5. **Proses** adalah aktivitas yang dilakukan organisasi dalam mengimplementasikan program dan memproses input menjadi output. Contoh proses: kegiatan pelatihan, kegiatan investigasi kejadian, kegiatan monitoring dan sebagainya.
6. **Input** merupakan semua sumber daya yang dikuasai organisasi dan masih perlu diproses sehingga dapat bermanfaat dalam menghasilkan output dan outcome.
7. **Asumsi** merupakan anggapan dasar terkait dengan program dan pihak yang terlibat di dalamnya, yang mendasari dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Kegagalan suatu program seringkali disebabkan oleh ketidakakuratan dari asumsi. Asumsi dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip, keyakinan atau ide-ide mengenai masalah dan situasi, sumber daya dan staf, cara kerja program, hasil dari program, basis pengetahuan, lingkungan internal dan eksternal serta partisipan.

Faktor eksternal mencakup semua hal di luar kendali pengelola program yang memiliki pengaruh besar dalam pencapaian outcome. Eksistensi faktor eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan sebuah program. Faktor-faktor eksternal meliputi lingkungan kultural, struktur ekonomi, pola demografi, lingkungan politik, pengaruh media, latar belakang dan pengalaman partisipan, perubahan peraturan, kebijakan prioritas dan sebagainya.

Pada Penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan

dengan memformulasikan *impact* untuk strategi dan *outcome* untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk periode 2018-2023 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung 2018-2023

RPJMD Kota Bandung 2018-2023			
Visi : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis			
Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani			
Tujuan : Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien			
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tertib administrasi kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Meningkatkan sarana prasarana pelayanan.
		- Meningkatkan cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan	Pengembangan Inovasi Pelayanan.
		- Meningkatkan cakupan pemanfaatan data kependudukan	Peningkatan Kerjasama dengan instansi lain.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam Renstra 2018-2023 ini mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis Kota Bandung yang menjadi urusan wajib Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yaitu urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada Renstra Perubahan ini menetapkan 8 (delapan) Program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandung 2018-2023 Sebelum Perubahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2017)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sebelum Perubahan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Tertib Administrasi Kependudukan				Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan		95	16.160.049.345	95,25	19.008.609.288	95,50	20.897.113.857	96	22.971.912.643	96,50	25.253.672.506	25.253.672.506	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Indeks Kepuasan Masyarakat	80,67	82,9	12.541.813.551	83	13.795.994.906	83,2	15.175.594.397	83,4	16.693.153.836	83,5	18.362.469.220	18.362.469.220	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	10.784.813.551	100%	13.049.731.600	100%	14.354.616.000	100%	15.790.054.000	100%	17.368.980.000	17.368.980.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2017)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sebelum Perubahan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan 10.440.900	12 Laporan 341.480.000	12 Laporan 375.628.000	12 Laporan 413.190.000	12 Laporan 454.500.000	454.500.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG					
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	12 Laporan	12 Laporan 1.576.500	12 Laporan 63.730.000	12 Laporan 70.103.000	12 Laporan 77.113.000	12 Laporan 84.820.000	84.820.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG					
			Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah laporan Peralatan Kerja yang diperbaiki	12 Laporan	12 Laporan 4.350.000	12 Laporan 113.655.000	12 Laporan 125.020.000	12 Laporan 137.522.000	12 Laporan 151.270.000	151.270.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG					
			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pengadaan Cetak dan Penggandaan	12 Laporan	12 Laporan 74.356.774	12 Laporan 211.792.000	12 Laporan 232.900.000	12 Laporan 256.190.000	12 Laporan 281.800.000	281.800.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG					
			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	n/a	12 Laporan 3.958.700	12 Laporan 59.213.000	12 Laporan 65.134.000	12 Laporan 71.647.000	12 Laporan 78.810.000	78.810.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2017)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sebelum Perubahan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Laporan	12 Laporan	.871.047.677	12 Laporan	2.245.250.000	12 Laporan	2.469.775.000	12 Laporan	2.716.750.000	12 Laporan	2.988.420.000	2.988.420.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	5.400.000	12 Laporan	38.940.000	12 Laporan	42.834.000	12 Laporan	47.110.000	12 Laporan	51.800.000	51.800.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Laporan	12 Laporan	4.320.000	12 Laporan	131.480.000	12 Laporan	144.628.000	12 Laporan	159.090.000	12 Laporan	174.990.000	174.990.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 Laporan	12 Laporan	70.148.000	12 Laporan	255.222.000	12 Laporan	280.740.000	12 Laporan	308.814.000	12 Laporan	339.690.000	339.690.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000	12 Laporan	660.000.000	12 Laporan	726.000.000	12 Laporan	798.600.000	12 Laporan	878.460.000	878.460.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2017)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sebelum Perubahan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	12 Laporan	12 Laporan 3.399.192.000	12 Laporan 4.418.949.600	12 Laporan 4.860.844.000	12 Laporan 5.346.928.000	12 Laporan 5.881.620.000	5.881.620.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG					
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	12 Laporan	12 Laporan 1.841.355.000	12 Laporan 2.025.490.000	12 Laporan 2.228.030.000	12 Laporan 2.450.830.000	12 Laporan 2.695.910.000	2.695.910.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG					
			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan 258.668.000	12 Laporan 2.484.530.000	12 Laporan 2.732.980.000	12 Laporan 3.006.270.000	12 Laporan 3.306.890.000	3.306.890.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG					
			Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	n/a	12 Laporan 59.264.693	12 Laporan 61.480.320	12 Laporan 67.628.352	12 Laporan 74.391.187	12 Laporan 81.830.306	81.830.306	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG					
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100% 1.423.000.000	100% 1.565.300.000	100% 1.721.830.000	100% 1.894.010.000	100% 2.083.410.000	2.083.410.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2017)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sebelum Perubahan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Laporan	12 Laporan 200.000.000	12 Laporan 220.000.000	12 Laporan 242.000.000	12 Laporan 266.200.000	12 Laporan 292.820.000	292.820.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG					
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	12 Laporan	12 Laporan 223.000.000	12 Laporan 1.345.300.000	12 Laporan 1.479.830.000	12 Laporan 1.627.810.000	12 Laporan 1.790.590.000	1.790.590.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG					
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	100%	100% 36.000.000	100% 149.600.000	100% 164.560.000	100% 181.016.000	100% 199.117.000	199.117.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG					
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	112 Stel	112 Stel 6.000.000	112 Stel 72.600.000	112 Stel 79.860.000	112 Stel 87.846.000	112 Stel 96.630.000	96.630.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG					
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	112 Stel	112 Stel 70.000.000	112 Stel 77.000.000	112 Stel 84.700.000	112 Stel 93.170.000	112 Stel 102.487.000	102.487.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2017)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sebelum Perubahan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	98.000.000	100%	203.940.000	100%	212.097.000	100%	218.459.000	100%	225.010.000	225.010.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Pembinaan Kinerja Aparatur	n/a	1 Laporan	98.000.000	1 Laporan	203.940.000	1 Laporan	212.097.000	1 Laporan	218.459.000	1 Laporan	225.010.000	225.010.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
				Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan		95	.433.821.800	95,25	1.492.816.000	95,50	1.642.088.000	96	1.806.280.000	96,5	1.986.880.000	1.986.880.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan		-	.	95,25	1.492.816.000	95,50	1.642.088.000	96	1.806.280.000	96,5	1.986.880.000	1.986.880.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah Laporan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk	n/a	-	.	12 Laporan	163.592.000	12 Laporan	179.950.000	12 Laporan	197.945.000	12 Laporan	217.730.000	217.730.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2017)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sebelum Perubahan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penduduk Keluar dan Datang	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk	n/a	-		12 Laporan	58.150.000	12 Laporan	63.965.000	12 Laporan	70.360.000	12 Laporan	77.390.000	77.390.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan	Jumlah laporan Kegiatan penduduk non permanen dan penduduk rentan	n/a	-		12 Laporan	50.336.000	12 Laporan	55.369.000	12 Laporan	60.900.000	12 Laporan	66.990.000	66.990.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	Jumlah layanan penerbitan akta kelahiran	n/a	-		60000 Dokumen	1.032.394.000	62000 Dokumen	1.135.630.000	65000 Dokumen	1.249.193.000	67000 Dokumen	1.374.110.000	1.374.110.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian bagi Masyarakat Non Muslim	Jumlah layanan penerbitan akta perkawinan bagi masyarakat non muslim	n/a	-		1000 Dokumen	59.204.000	1100 Dokumen	65.120.000	1200 Dokumen	71.632.000	1300 Dokumen	78.790.000	78.790.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	Jumlah layanan penerbitan dokumen perubahan status anak, pewarganegaraan dan akta kematian	n/a	-		10000 Dokumen	129.140.000	11000 Dokumen	142.054.000	12000 Dokumen	156.250.000	13000 Dokumen	171.870.000	171.870.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2017)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sebelum Perubahan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Keserasian Database Kependudukan		98%	2.131.261.800			DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terimplementasi	n/a	4 Laporan	593.708.800	-	.	-	.	-	.	-	.		DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Pengelolaan Data Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah Laporan keserasian data yang tervalidasi	n/a	12 Laporan	51.900.000	-	.	-	.	-	.	-	.		DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Diseminasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan diseminasi kebijakan kependudukan	n/a	12 Laporan	385.653.000	-	.	-	.	-	.	-	.		DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil		90%	1.091.580.000			DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2017)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sebelum Perubahan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	Jumlah layanan penerbitan akta kelahiran	n/a	67000 Dokumen	938.540.000	-	.	-	.	-	.	-	.		DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian bagi Masyarakat Non Muslim	Jumlah layanan penerbitan akta perkawinan bagi masyarakat non muslim	n/a	1000 Dokumen	35.640.000	-	.	-	.	-	.	-	.		DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian	Jumlah layanan penerbitan dokumen perubahan status anak, pewarganegaraan dan akta kematian	n/a	7000 Dokumen	117.400.000	-	.	-	.	-	.	-	.		DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan layanan administrasi pendaftaran penduduk		90%	10.980.000			DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP	n/a	1700000 Orang	48.720.000	-	.	-	.	-	.	-	.		DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2017)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sebelum Perubahan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penduduk Keluar dan Datang	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk	n/a	12 Laporan	16.500.000	-	.	-	.	-	.	-	.		DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan	Jumlah laporan Kegiatan penduduk non permanen dan penduduk rentan	n/a	12 Laporan	45.760.000	-	.	-	.	-	.	-	.		DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
																	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
				Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan		50	184.413.994										DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan		50	184.413.994										DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2017)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sebelum Perubahan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Kerjasama dengan Instansi Lain	n/a	5 Dokumen	78.540.000	-	.	-	.	-	.	-	.	.	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Laporan Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	n/a	12 Laporan	46.352.000	-	.	-	.	-	.	-	.	.	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Konsep inovasi layanan administrasi kependudukan	n/a	2 Laporan	9.521.994	-	.	-	.	-	.	-	.	.	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Program Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan		.		60 %	2.547.221.688	65 %	2.801.922.857	70 %	3.082.093.643	75 %	3.390.275.506	3.390.275.506	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Dokumen Perjanjian kerjasama	n/a	-	.	30 Dokumen	86.394.000	35 Dokumen	95.030.000	40 Dokumen	104.533.000	45 Dokumen	114.980.000	114.980.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2017)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sebelum Perubahan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Kegiatan Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Laporan Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	n/a	-	.	12 Laporan	50.986.000	12 Laporan	56.078.000	12 Laporan	61.685.000	12 Laporan	67.850.000	67.850.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Konsep inovasi layanan administrasi kependudukan	n/a	-	.	4 Laporan	65.470.000	4 Laporan	72.017.000	4 Laporan	79.210.000	4 Laporan	87.130.000	87.130.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terimplementasi	n/a	-	.	4 Laporan	1.753.071.688	4 Laporan	1.928.377.857	4 Laporan	2.121.215.642	4 Laporan	2.333.335.507	2.333.335.507	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Pengelolaan Data Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah Laporan data yang tervalidasi	n/a	-	.	12 laporan	167.090.000	12 laporan	183.790.000	12 laporan	202.160.000	12 laporan	222.370.000	222.370.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			Kegiatan Diseminasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan diseminasi kebijakan kependudukan	n/a	-	.	12 laporan	424.210.000	12 laporan	466.630.000	12 laporan	513.290.000	12 laporan	564.610.000	564.610.000	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

Tabel 6.2

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandung 2018-2023 Setelah Perubahan**

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)								(8)	(9)	(10)
1.	Tertib Administrasi Kependuduk an			1. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	97,08	95	n/a	95,50 %	31.324.739.815	96%	33.895.058.296	96,50%	36.564.100.551	96,50%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUN G
		1.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administ rasi Kependu kan		1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	85	24.377.056.613	85,50	26.941.492.476	86	28.844.452.549	86	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUN G

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			1.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.1.1 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	n/a	100%	n/a	100%	24.377.056.613	100%	26.941.492.476	100%	28.844.452.549	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.1.1.1 Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	100%	n/a	100%	13.637.219.822	100%	15.748.763.502	100%	16.536.201.677	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.1.1.1 Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	n/a	100%	n/a	100%	13.637.219.822	100%	15.748.763.502	100%	16.536.201.677	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.1.1.2 Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	68.200.000	12 Laporan	75.020.000	12 Laporan	78.771.000	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.2.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.1.1.2.1 Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	68.200.000	12 Laporan	75.020.000	12 Laporan	78.771.000	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			1.1.1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.1.1.3 Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	2.983.700.604	12 Laporan	3.282.070.664	12 Laporan	3.610.277.731	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.1.1.3.1 Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	n/a	n/a	n/a	100%	10.535.000	100%	11.588.500	100%	12.747.350	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.1.1.3.2 Cakupan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	100%	2.322.411.804	100%	2.554.652.984	100%	2.810.118.283	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.1.1.3.3 Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	64.274.000	12 Laporan	70.701.400	12 Laporan	77.771.540	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.1.1.3.4 Cakupan Penyediaan Logistik Kantor	n/a	n/a	n/a	100%	317.303.800	100%	349.034.180	100%	383.937.598	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			1.1.1.3.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.1.1.3.5 Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	n/a	n/a	n/a	100%	154.650.000	100%	170.115.000	100%	187.126.500	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.3.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.1.1.3.6 Jumlah Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	n/a	n/a	n/a	12 Jasa bulanan	18.526.000	12 Jasa bulanan	20.378.600	12 Jasa bulanan	22.416.460	12 Jasa bulanan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.3.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.1.1.3.7 Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	n/a	n/a	n/a	100%	96.000.000	100%	105.600.000	100%	116.160.000	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.1.1.4 Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	100%	5.935.426.000	100%	6.065.426.000	100%	6.671.968.600	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.1.1.4.1 Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	n/a	n/a	n/a	4 Jasa Bulanan	239.410.000	4 Jasa Bulanan	269.410.000	4 Jasa Bulanan	296.351.000	4 Jasa Bulanan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			1.1.1.4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.1.1.4.2 Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	5.696.016.000	12 Laporan	5.796.016.000	12 Laporan	6.375.617.600	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.1.1.5 Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	100%	1.752.510.187	100%	1.770.212.310	100%	1.947.233.541	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.1.1.5.1 Persentase Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	n/a	n/a	n/a	100%	461.888.727	100%	466.554.270	100%	513.209.697	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.1.1.5.2 Persentase Unit Kendaraan Operasional yang Terpelihara	n/a	n/a	n/a	100%	987.209.230	100%	997.181.040	100%	1.096.899.144	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			1.1.1.5.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.1.1.5.2 Persentase Unit Peralatan dan Mesin yang terpelihara	n/a	n/a	n/a	100%	108.439.650	100%	109.535.000	100%	120.488.500	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.1.5.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.1.1.5.2 Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	n/a	n/a	n/a	1 Unit	194.972.580	1 Unit	196.942.000	1 Unit	216.636.200	1 Unit	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
				1.2 Cakupan layanan administrasi kependudukan	97,08	95	n/a	95,50 %	4.586.969.198	96%	4.633.302.220	96,50%	5.096.632.442	95,50%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.2.1 Cakupan layanan administrasi Pendaftaran Penduduk	n/a	n/a	n/a	98,50 %	4.324.935.998	99,00 %	4.368.622.220	99,25%	4.805.484.442	99,25%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.2.1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.2.1.1 Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Tepat Waktu	n/a	n/a	n/a	100%	4.324.935.998	100%	4.368.622.220	100%	4.805.484.442	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			1.1.2.1.1 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1.2.1.1.1 Jumlah laporan Kegiatan penduduk non permanen dan penduduk rentan	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	47.452.898	12 Laporan	47.932.220	12 Laporan	52.725.442	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.2.1.2 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.2.1.1.2 Persentase Pencetakan KTP-EL dan Kartu Keluarga Tepat Waktu	n/a	n/a	n/a	100%	4.213.830.060	100%	4.256.394.000	100%	4.682.033.400	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.2.1.3 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1.2.1.1.3 Persentase Penerbitan Dokumen Pindah Keluar Tepat Waktu	n/a	n/a	n/a	100%	63.653.040	100%	64.296.000	100%	70.725.600	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.1.3 Cakupan Layanan Administrasi Pencatatan Sipil	n/a	n/a	n/a	92,00 %	262.033.200	93,50 %	264.680.000	94,00%	291.148.000	94,00%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.1 Pelayanan Pencatatan Sipil	1.1.3.1 Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu	n/a	n/a	n/a	100%	178.833.600	100%	180.640.000	100%	198.704.000	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			1.1.3.1.1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1.1.3.1.1 Cakupan Penerbitan Dokumen Akta Kematian Tepat Waktu	n/a	n/a	n/a	100%	84.981.600	100%	85.840.000	100%	94.424.000	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.1.2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1.1.3.1.2 Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Tepat Waktu	n/a	n/a	n/a	100%	93.852.000	100%	94.800.000	100%	104.280.000	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.2 Pelayanan Pencatatan Sipil	1.1.3.2 Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu	n/a	n/a	n/a	100%	83.199.600	100%	84.040.000	100%	92.444.000	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.2.1 Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	1.1.3.2.1 Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan Tepat Waktu	n/a	n/a	n/a	100%	83.199.600	100%	84.040.000	100%	92.444.000	100%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
				1.3 Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	60%	60%	n/a	65%	2.297.060.964	70%	2.320.263.600	75%	2.552.289.960	75%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			1.1.3 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.1.3.1 Cakupan Perangkat Daerah yang Aktif melakukan kerjasama	n/a	60	n/a	65%	2.297.060.964	70%	2.320.263.600	75%	2.552.289.960	75%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
				1.1.3.2 Maksimum Deviasi Keserasian Data Kependudukan	n/a	n/a	n/a	2%		2%		2%		2%	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG
			1.1.3.1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1.1.3.1 Jumlah Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	192.128.112	12 Laporan	194.068.800	12 Laporan	213.475.680	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.1.1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1.1.3.1.1 Jumlah Laporan data yang tervalidasi	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	88.470.360	12 Laporan	89.364.000	12 Laporan	98.300.400	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.1.2 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	1.1.3.1.2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	103.657.752	12 Laporan	104.704.800	12 Laporan	115.175.280	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.2 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.1.3.2 Jumlah Perencanaan dan Laporan Penyelenggaraan Admuduk	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	72.068.040	12 Laporan	72.796.000	12 Laporan	80.075.600	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			1.1.3.2.1 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.1.3.2.1 Jumlah Laporan Fasilitas Inovasi	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	72.068.040	12 Laporan	72.796.000	12 Laporan	80.075.600	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.3.1 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.1.3.3.1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	1.914.064.812	12 Laporan	1.933.398.800	12 Laporan	2.126.738.680	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.3.1 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.1.3.3.1 Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terimplementasi	n/a	n/a	n/a	4 Laporan	1.782.356.400	4 Laporan	1.800.360.000	4 Laporan	1.980.396.000	4 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.3.2 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1.1.3.3.2 Jumlah Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	42.386.652	12 Laporan	42.814.800	12 Laporan	47.096.280	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			1.1.3.3 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1.1.3.3 Jumlah Laporan Sosialisasi Administrasi Kependudukan	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	89.321.760	12 Laporan	90.224.000	12 Laporan	99.246.400	12 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.4 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.1.3.4 Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	n/a	n/a	n/a	1 Laporan	118.800.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	132.000.000	1 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG
			1.1.3.4.1 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1.1.3.4.1 Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	n/a	n/a	n/a	1 Laporan	118.800.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	132.000.000	1 Laporan	DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disesuaikan dengan bidang urusannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perangkat daerah yang melakukan urusan Administrasi Kependudukan. Dari urusan penyelenggaraan pemerintahan ini perangkat daerah harus menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang capaiannya harus mendukung visi misi kepala daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 serta harus berisi informasi yang menggambarkan kondisi nyata Kota.

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung 2018-2023 mengacu kepada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung periode 2018-2023.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah *Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis*. Sedangkan Misi yang terkait dengan kinerja penyelenggaraan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah Misi ke-2 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani. Adapun Tujuan yang akan dicapai adalah Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien. Dengan sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas

Kinerja Birokrasi dengan salah satu indikator sasarannya adalah Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik".

Tabel 7.1
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Bandung
Yang Terkait Dengan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bandung

MISI RPJMD	TUJUAN/SASARAN/ STRATEGI	INDIKATOR KINERJA
MISI 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani	<p><i>Tujuan :</i></p> <p>Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien</p> <p><i>Sasaran :</i></p> <p>Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi</p> <p><i>Strategi :</i></p> <p>Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima</p>	<p><i>Indikator Tujuan :</i></p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi</p> <p><i>Indikator Sasaran :</i></p> <p>Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"</p> <p><i>Indikator Strategi :</i></p> <p>Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan</p>

Dari misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang tercantum di dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 tersebut Kependudukan Kota Bandung menetapkan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 7.2 di bawah ini:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandung yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
Perubahan RPJMD
Kota Bandung 2018-2023

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	93,34	95	95,25	95,50	96,25	96,50	96,50

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2018-2023 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses perumusan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung 2018-2023 mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2018-2023 serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, yang berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2018-2023 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun (2018-2023). Sasaran, program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kinerja tahunan dan Rencana Kerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Renstra ini juga menjadi pedoman dalam pengukuran kinerja dan

pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan dapat mewujudkan tujuan, sasaran, indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sehingga dapat mewujudkan ketercapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator dari RPJMD Kota Bandung 2018-2023.

Bandung, 7 Desember 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG**

H. TATANG MUHTAR, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19680602 198903 1 004

LAMPIRAN

TABEL PANJANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target			Satuan
				2020	2021	2022	2023	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	71,75	70,00	70,07	70,13	Nilai

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target			Satuan
			2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,9	83,5	83,75	84	Nilai
		Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	95	94,5	95	95,5	Persen
		Cakupan Layanan Pemanfaatan Data	65	65	70	75	Persen

No	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	Target			Satuan	Anggaran
			2020	1	2	3		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100,00	100,00	100,00	100,00	Persentase	29.797.181.682
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Layanan Administrasi Pendaftaran Penduduk	99,81	98,50	99,00	99,00	Persentase	37.290.000
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Layanan Administrasi Pencatatan Sipil	94,35	92,50	93,00	94,00	Persentase	37.290.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	60,00	65,00	70,00	75,00	Persentase	1.855.360.000

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Awal	Target			Satuan	Anggaran
			2020	1	2	3		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	Persentase	13.637.219.822
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	12	12	12	Laporan	511.491.500
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	Persentase	4.003.727.060
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	Persentase	6.194.828.700
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	Persentase	1.118.953.000
6	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Tepat Waktu	100	100	100	100	Persentase	22.000.000
7	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Tepat Waktu	100	100	100	100	Persentase	15.290.000
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu	100	100	100	100	Persentase	11.000.000
8	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu	100	100	100	100	Persentase	26.290.000
9	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	12	12	12	12	Laporan	22.000.000
10	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	12	12	12	Laporan	1.800.360.000